

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN BADAN MENURUT UU NO. 36
TAHUN 2008, INSENTIF PAJAK DAN
NONPAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

YULIANI

NIM. C2C009207

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yuliani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009207
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENURUNAN TARIF
PAJAK PENGHASILAN BADAN
MENURUT UU NO. 36 TAHUN 2008,
INSENTIF PAJAK DAN NONPAJAK
TERHADAP MANAJEMEN LABA
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
DI INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 10 April 2013

Dosen Pembimbing,

(Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19790924 200812 2003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yuliani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009207
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH PENURUNAN TARIF
PAJAK PENGHASILAN BADAN
MENURUT UU NO. 36 TAHUN 2008,
INSENTIF PAJAK DAN NONPAJAK
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Aditya Septiani, SE., M.Si., Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 April 2013

Tim Penguji :

1. Aditya Septiani, SE., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Etna Nur Afri Y, SE., M.Si., Akt. (.....)
3. Dul Muid, SE., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yuliani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT UU NO. 36 TAHUN 2008, INSENTIF PAJAK DAN NONPAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dan meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 April 2013

Yang membuat pernyataan,

Yuliani

NIM: C2C009207

ABSTRACT

This study aimed to test whether manufacturing companies in Indonesia to earnings management, with a decrease in the corporate tax rate by tax incentives or non-tax incentives. The sample was 342 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, which has published its financial statements from the years 2007-2010.

The method of analysis in this study using different test of one sample t-test and multiple linear regression analysis. That different test was used to determine whether manufacturing companies perform earnings management in the year before and after the reduction in the corporate tax rate. The results can be seen from the discretionary accrual. While the test used multiple linear regression to determine whether earnings management by the company manufactures influenced by tax incentives and / or non-tax incentives in response to changes in income tax rates.

The results showed that: 1) the company's conduct at the time of earnings management before and after the reduction in the corporate tax rate, 2) manufacturing firms perform earnings management that is influenced by tax incentives (tax planning and net deferred tax liabilities) and non-tax incentives (firm size).

Keywords: reduction in the corporate tax rate, earnings management, tax incentives, non-tax incentives.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan manajemen laba, dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan insentif pajak atau insentif nonpajak. Sampel penelitian ini adalah 342 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang telah mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2007-2010.

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan uji beda *t-test* dengan menggunakan *one sample t-test* dan dengan analisis regresi linear berganda. Uji beda *t-test* digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan manufaktur melakukan manajemen laba pada tahun sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan. Hasil tersebut dapat dilihat dari *discretionary accrualnya*. Sedangkan uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur dipengaruhi oleh insentif pajak dan/atau insentif nonpajak dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perusahaan melakukan manajemen laba pada saat sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan; 2) perusahaan manufaktur melakukan manajemen laba yang dipengaruhi oleh insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan insentif nonpajak (ukuran perusahaan).

Kata Kunci : penurunan tarif pajak penghasilan badan, manajemen laba, insentif pajak, insentif nonpajak.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Without a struggle, there can be no progress”

(Frederick Douglass)

*“The only way to do great work is to love what you do. If you
haven't found it yet, keep looking. Don't settle”*

(Steve Jobs)

*“Don't worry about failures, worry about the chances you miss
when you don't even try”*

(Jack Canfield)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan
untuk mama papa tercinta,
serta Ntio dan ko Tiong.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “*Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Insentif Pajak Dan Nonpajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*” ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, bantuan, dan doanya yang tulus sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mama papa, Ntio, dan ko Tiong tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ph.D., M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan baik, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak pelajaran penting bagi penulis.
5. Siti Mutmainah, SE., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
6. Semua dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang atas bantuan selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2009 yang telah memberikan berbagai warna dalam perjalanan masa kuliah ini.
9. Kak Linda, Kak Boti, Bang Sep, Matius Levi senior yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman KKN desa Karanggondang yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis, selalu bisa membuat tertawa di setiap ada masalah. Terima kasih, teman-teman.
11. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 12 Februari 2013

Penulis,

Yuliani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9
2.1.2 Teori Akuntansi Positif (<i>Positive Accounting Theory</i>)	11
2.1.3 Manajemen Laba	13
2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba	15
2.1.5 AkruaI	17

2.1.6 Pajak	18
2.1.7 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008.....	18
2.1.8 Insentif Pajak	20
2.1.9 Insentif Nonpajak	20
2.1.9.1 <i>Earning Pressure</i>	21
2.1.9.2 Tingkat Hutang Perusahaan	21
2.1.9.3 Ukuran Perusahaan	22
2.1.10 Tarif Pajak Penghasilan untuk Perusahaan <i>Go Public</i> dan Minimal 40% saham Disetornya Diperdagangkan di BEI	22
2.1.11 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 terhadap Manajemen Laba	23
2.1.12 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Manajemen Laba	24
2.1.12.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	24
2.1.12.2 Pengaruh Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih terhadap Manajemen Laba	24
2.1.13 Pengaruh <i>Earning Pressure</i> terhadap Manajemen Laba	25
2.1.14 Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan terhadap Manajemen Laba	25
2.1.15 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba	25
2.1.16 Pengaruh Presentase Jumlah Saham Disetor Perusahaan di BEI terhadap Manajemen Laba	26
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	31
2.4 Perumusan Hipotesis.....	35
2.4.1 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 dengan Manajemen Laba	35

2.4.2	Perencanaan Pajak dengan Manajemen Laba	36
2.4.3	Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih dengan Manajemen Laba	37
2.4.4	<i>Earning Pressure</i> dengan Manajemen Laba	37
2.4.5	Tingkat Hutang Perusahaan dengan Manajemen Laba ..	38
2.4.6	Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba	39
2.4.7	Presentase Jumlah Saham Disetor Perusahaan di BEI dengan Manajemen Laba	40
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Variabel Penelitian	41
3.2	Definisi Variabel	41
3.2.1	Variabel Dependen	42
3.2.1.1	Manajemen Laba	42
3.2.2	Variabel Independen	42
3.2.2.1	Perubahan Tarif Pajak Badan 2008	42
3.2.2.2	Insentif Pajak	42
3.2.2.2.1	Perencanaan Pajak	43
3.2.2.2.2	Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih	43
3.2.2.3	Insentif Nonpajak	43
3.2.2.3.1	<i>Earning Pressure</i>	43
3.2.2.3.2	Tingkat Hutang Perusahaan	43
3.2.2.3.3	Ukuran Perusahaan	43
3.2.2.3.4	Presentase Jumlah Saham Disetor Perusahaan di BEI	44
3.3	Pengukuran Variabel	44
3.3.1	<i>Discretionary Accrual</i> (DA)	44
3.3.2	Perencanaan Pajak	45
3.3.3	Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih (NDTL)	47
3.3.4	<i>Earning Pressure</i> (EPRESS)	47
3.3.5	Tingkat Hutang Perusahaan (DEBT)	47
3.3.6	Ukuran Perusahaan (SIZE)	48

3.3.7	Presentase Jumlah Saham Disetor Perusahaan yang Diperdagangkan di BEI (STOCK)	48
3.4	Populasi dan Sampel	48
3.5	Jenis dan Sumber Data	49
3.6	Metode Pengumpulan Data	49
3.7	Metode Analisis	49
3.7.1	Statistik Deskriptif	50
3.7.2	Uji Beda T-test	50
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	51
3.7.3.1	Uji Normalitas	51
3.7.3.2	Uji Multikolinearitas	52
3.7.3.3	Uji Heteroskedastisitas	53
3.7.3.4	Uji Autokorelasi	54
3.7.4	Analisis Regresi Linear Berganda	54
3.7.5	Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistif F)	56
3.7.6	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	56
3.7.7	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian.....	58
4.2	Analisis Data.....	58
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	58
4.2.2	Uji Beda T-Test	63
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	65
4.2.3.1	Uji Normalitas	65
4.2.3.2	Uji Multikolinearitas	68
4.2.3.3	Uji Heteroskedastisitas	69
4.2.3.4	Uji Autokorelasi	71
4.2.4	Analisis Regresi Linear Berganda	72
4.2.4.1	Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F)	72
4.2.4.2	Uji Signifikansi Parameter Individual	73
4.2.4.3	Uji Koefisien Determinasi	75

4.3 Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan penelitian	82
5.3 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan UU Tarif PPh Badan 1983, 1994, 2000, 2008	19
Tabel 2.2	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1	Sampel Penelitian	59
Tabel 4.2	Deskripsi Variabel <i>Discretionary Accrual</i>	60
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	61
Tabel 4.4	Hasil Uji <i>Discretionary Accrual</i>	64
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.7	Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan	72
Tabel 4.8	Hasil Uji Statistik t	73
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Kerangka Teoritis – 1	33
Gambar 2.2	Model Kerangka Teoritis – 2	34
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas Sebelum <i>Outlier</i> Dikeluarkan	66
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas Setelah <i>Outlier</i> Dikeluarkan	67
Gambar 4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	70

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan, masing-masing diuraikan sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik antara manajemen dengan pemerintah biasanya timbul dalam hal perpajakan. Pada dasarnya, pemerintah berkeinginan agar perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan perusahaan, sebagai pihak yang melakukan pembayaran, sudah pasti ingin membayar pajak sekecil mungkin. Apabila beban pajak tersebut dirasakan terlalu berat bagi perusahaan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan, atau yang sering disebut dengan manajemen laba (Anggraeni, 2011).

Manajemen laba merupakan pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu (Scott, 2003). Dalam penelitian ini, manajemen laba dilakukan perusahaan untuk memperkecil laba kena pajaknya, karena mulai tahun pajak 2009 tarif pajak penghasilan badan menganut sistem *single tax*, yaitu 28% dan pada tahun 2010 menjadi 25%. Berapapun penghasilan kena pajak perusahaan, tarif yang dikenakan adalah tarif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010.

Namun, ada pengecualian bagi perusahaan yang sudah *go public*, yaitu penurunan tarif sebesar 5% dari tarif pajak yang sesungguhnya, dengan syarat apabila minimal 40% dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di BEI (UU No. 36 tahun 2008).

Manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga disebabkan adanya insentif. Insentif merupakan perangsang yang ditawarkan kepada karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau melebihi standar yang telah ditetapkan (Hani Handoko, 2002).

Dalam hal ini, insentif dibagi menjadi dua, yaitu insentif pajak dan insentif nonpajak. Dari pengertian insentif di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa insentif pajak adalah perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak. Sedangkan insentif nonpajak, yaitu insentif yang dilakukan perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas karyawannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan reformasi perpajakan badan telah banyak dilakukan. Yin dan Cheng (2004) menguji pengaruh dari insentif pajak dan nonpajak terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi perubahan tarif pajak di Amerika Serikat. Hasil penelitian Yin dan Cheng menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) lebih tertarik untuk mengurangi *discretionary accrual* untuk mendapatkan keuntungan perpajakan.

Yamashita dan Otagawa (2007) meneliti mengenai pengaruh dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan terhadap perusahaan di Jepang.

Penelitian mereka membuktikan bahwa perusahaan menunda pendapatan buku mereka dalam menanggapi perubahan Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan laba kena pajaknya.

Setiawati (2001) menguji apakah ada perilaku manajemen laba dalam merespon perubahan Undang-Undang PPh tahun 1994 yang efektif per 1 Januari 1995 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Namun, hasil penelitian tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha untuk menurunkan laba tahun 1994 dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak pada tahun yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2004) membuktikan bahwa perusahaan masih melakukan praktek manajemen laba setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan 2000. Tingkat *discretionary accrual* setelah adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan 2000 lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan.

Penelitian yang dilakukan Subagyo dan Octavia (2010) menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) saja yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia. Perusahaan tersebut memanipulasi labanya untuk meminimalisir pembayaran pajaknya. Peneliti juga menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) melakukan manajemen laba dengan dipengaruhi oleh insentif pajak dan insentif nonpajak, sedangkan perusahaan yang memperoleh kerugian (*loss firm*) melakukan manajemen laba dengan dipengaruhi oleh insentif nonpajak saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2011) merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Zulaikha (2004). Anggraeni tidak dapat menemukan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan laba kena pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Martani (2011) menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) dan perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak badan di Indonesia. Perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) melakukan praktek manajemen laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*). Wijaya dan Martani (2011) juga membuktikan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) dipengaruhi oleh insentif pajak, yaitu perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih, serta insentif nonpajak, yaitu *earning pressure*. Sedangkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) dipengaruhi oleh faktor insentif pajak, yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih dan faktor insentif nonpajak, yaitu *earning pressure* (Wijaya dan Martani, 2011).

Penelitian ini menggunakan perencanaan pajak (*Taxplan*) dan kewajiban pajak tangguhan bersih (*Net Deffered Tax Liability*) sebagai insentif pajak dalam melakukan praktek manajemen laba. Seperti penelitian sebelumnya, penggunaan perencanaan pajak (*Taxplan*) karena perencanaan pajak akan dilakukan manajer untuk memanipulasi laba kena pajaknya, sedangkan kewajiban pajak tangguhan bersih digunakan karena aktivitas manajemen laba dapat dideteksi salah satunya

dengan kewajiban pajak tangguhan bersih, yang jika dinaikkan akan menaikkan juga beban pajak tangguhan, dan menurut Phillips *et al.* (2003), beban pajak tangguhan nantinya akan menghasilkan total akrual dan ukuran abnormal akrual dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari laba menurun.

Penelitian ini dilakukan karena adanya perubahan Undang-undang, dari UU No. 17 tahun 2000 menjadi UU No. 36 tahun 2008. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan periode pengamatan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pengamatan penelitian dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahun 2008 saat UU No. 36 tahun 2008 dikeluarkan, kemudian tahun 2009 saat tarif PPh badan berubah menjadi *single tax* dari 30% menjadi 28%, kemudian tahun 2010 dari 28% menjadi 25%. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya dan Martani (2011) hanya meneliti tahun 2008 dan 2009.

Berdasarkan uraian di atas, alasan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar respon perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan badan dengan melakukan *earning management* (manajemen laba) guna meminimalkan beban pajaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat manajemen laba pada perusahaan dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008?

2. Apakah perusahaan melakukan manajemen laba yang dipengaruhi oleh insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan/atau insentif nonpajak (*earning pressure*, tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, dan jumlah saham disetor perusahaan di BEI)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan manajemen laba pada perusahaan dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan badan.
2. Untuk menguji apakah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan/atau insentif nonpajak (*earning pressure*, tingkat hutang perusahaan, *earning bath*, ukuran perusahaan, dan jumlah saham disetor perusahaan di BEI).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi regulator

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku manajemen yang dilakukan perusahaan dalam

menanggapi adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2008 (UU No. 36 tahun 2008).

2. Bagi para praktisi bisnis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman tentang manajemen laba kepada praktisi bisnis, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal – hal yang dibahas dalam tiap – tiap bab. Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka

Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis

yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berpikir secara logis, serta perumusan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data, implikasi hasil penelitian, dan disampaikan pula keterbatasan penelitian, serta saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini, telaah pustaka dan pengembangan hipotesis disusun menurut alur berpikir dan penyajian sebagai berikut :

1. Uraian dan penjelasan mengenai teori – teori yang menjadi dasar penelitian ini, meliputi Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*).
2. Penjelasan dan uraian mengenai definisi dari teori yang digunakan.
3. Pengembangan hipotesis dan argumentasi yang mendasari pemikiran logis hipotesis pada penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

Dalam bagian ini akan dipaparkan teori-teori yang melandasi penelitian ini. Mulai dari Teori Keagenan (*Agency Theory*), Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*), serta penjelasan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen laba.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hendriksen dan Breda (1992) menggambarkan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antara *agent* dan *principal*. *Agent* menutup kontrak untuk melakukan suatu hal tertentu bagi *principal*, begitu juga *principal* menutup

kontrak untuk memberi imbalan kepada *agent*. Apabila dianalogikan mungkin seperti pemilik dan manajer perusahaan.

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Hendriksen dan Brada, 1992).

Principal tidak memiliki informasi yang cukup terhadap kinerja *agent*, sedangkan *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi. Terdapat dua tipe asimetri informasi menurut Hendriksen dan Brada (2005), yaitu :

1. *Moral Hazard*

Moral hazard merupakan keadaan di mana aksi manajer mungkin berbeda dari aksi yang lebih disukai pemilik, entah karena manajer mempunyai tingkat preferensi yang berbeda, atau karena manajer sengaja untuk melalaikan tugasnya.

2. *Adverse Selection*

Adverse selection merupakan keadaan di mana salah satu pihak dalam perusahaan memiliki informasi yang lebih daripada pihak lainnya, yaitu *agent* memiliki informasi yang lebih atas *principal*.

Eisenhardt (1989) dalam Haris (2004) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui *Positive Accounting Theory* (PAT). PAT menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu.

Menurut PAT, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Scott (2006) menjelaskan bahwa dengan adanya kebebasan tersebut, manajer memiliki kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut PAT dinamakan sebagai tindakan oportunistis

(opportunistic behavior). Tindakan oportunis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan.

Tiga hipotesis PAT yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sulistyanto (2008), yaitu :

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik, tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan, sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun.

2. *Debt (Equity) Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang, maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang. Pada perusahaan yang mempunyai *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan

cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditur, bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

3. *Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba, dengan alasan masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan dunia perpajakan. UU mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu.

Dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Kondisi inilah yang merangsang manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi.

2.1.3 Manajemen Laba

Menurut Scott (2003:369), manajemen laba merupakan pilihan yang dilakukan manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang tidak netral (memihak), dan manajer juga ikut campur tangan untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Manajer melakukan campur tangan

dalam hal modifikasi tentang bagaimana mereka menginterpretasikan berbagai standar akuntansi keuangan dan data akuntansi (Healy dan Wahlen, 1999 dalam Lestari, 2011).

Menurut Sugiri (1998) dalam Ardilla (2012), *earning management* dibagi ke dalam dua definisi, yaitu :

1. Definisi sempit

Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. *Earning management* dalam arti sempit didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya earnings.

2. Definisi luas

Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit, di mana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Menurut Scott (2003:383), berbagai pola yang sering dilakukan manajer dalam *earning management* adalah :

1. *Taking a bath*

Taking a bath terjadi ketika perusahaan mengadakan reorganisasi, misalnya pengangkatan CEO baru. *Taking a bath* mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan. Konsekuensinya, manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat.

2. *Income minimization*

Income minimization mirip dengan “taking a bath” tetapi lebih ekstrim, yaitu dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang lebih tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud, dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya.

3. *Income maximization*

Income maximization merupakan cara dari manajemen untuk memaksimalkan laba yang dilaporkan, agar bonus yang didapat lebih besar. Income maximization dilakukan ketika perusahaan mengalami penurunan laba.

4. *Income smoothing*

Income smoothing dilakukan manajer dengan meratakan laba perusahaan untuk tujuan pelaporan terhadap pihak yang berkepentingan, terutama investor, karena investor cenderung lebih menyukai laba yang relatif stabil dari suatu periode ke periode berikutnya.

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Menurut Scott (2003:377), beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, yaitu :

1. Motivasi bonus

Manajer akan berusaha mengatur laba bersih yang dilaporkan dengan tujuan memaksimalkan jumlah bonus yang akan didapatnya.

2. Motivasi kontrak

Manajer akan menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kesalahan teknik. Motivasi kontrak ini biasanya berhubungan dengan kontrak jangka panjang.

3. Motivasi politik

Perusahaan besar biasanya menurunkan labanya guna mengurangi biaya politik dan pengawasan dari pemerintah, memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah..

4. Motivasi pajak

Merupakan salah satu alasan utama mengapa manajer melakukan manajemen laba, yaitu dengan mengurangi laba bersih. Manajemen laba dilakukan oleh manajer guna meminimalisir pembayarannya.

5. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)

CEO yang mendekati akhir masa jabatannya akan meningkatkan bonusnya dengan melakukan income maximization.

6. Penawaran saham perdana (IPO)

Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya di pasar modal belum mempunyai harga pasar, sehingga memiliki masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Manajemen melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya, dengan harapan dapat memberikan sinyal positif kepada investor.

2.1.5 Akrua

Terdapat dua jenis basis pencatatan, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Menurut akuntansi, *cash basis* adalah basis akuntansi yang mencatat pendapatan hanya ketika kas atau setara kas diterima dan mencatat beban ketika kas atau setara kas dikeluarkan. Sedangkan *accrual basis* adalah basis akuntansi di mana pengakuan pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) dilakukan pada periode di mana transaksi pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pengeluaran kas. Berdasarkan pengertian di atas, *accrual basis* yang banyak digunakan oleh perusahaan (Anggraeni, 2011).

Satwika dan Damayanti (2005) dalam Anggraeni (2011) menyatakan bahwa akrual merupakan jumlah penyesuaian akuntansi yang dibutuhkan untuk mengubah arus kas operasi menjadi laba bersih. Akrua dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Nondiscretionary Accrual (Normal Accruals)*

Merupakan pengakuan akrual yang wajar dan tunduk pada saat standar atau peraturan akuntansi yang berlaku umum.

2. *Discretionary Accrual (Abnormal Accruals)*

Merupakan pengakuan akrual yang bebas, tidak diatur, dan merupakan pilihan kebijakan manajemen.

Basis akrual akan menyediakan banyak keleluasaan bagi manajer dalam hal pengakuan pendapatan dan beban. Manajer dapat melakukan manipulasi data akuntansi dalam laporan keuangan dengan *discretionary accrual*.

2.1.6 Pajak

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber penting bagi pendapatan negara. Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan (Wijaya dan Martani, 2011).

2.1.7 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008

Perubahan Undang-undang terbaru di Indonesia mengenai Pajak Penghasilan terjadi di tahun 2008. Hal tersebut diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 (Ardilla, 2012). Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tersebut merupakan perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang-undang tarif PPh badan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1**Perbedaan Undang-undang Tarif PPh Badan 1983, 1994, 2000, 2008**

UU No. 7 / 1983 PKP dan Tarif	UU No. 10 / 1994 PKP dan Tarif	UU No. 17 / 2000 PKP dan Tarif	UU No. 36 / 2008 PKP dan Tarif
PKP s.d. 10.000.000 = 15%	PKP s.d. 25.000.000 = 10%	PKP s.d. 50.000.000 = 10%	Tarif Wajib Pajak Badan dan BUT adalah 28% (diefektifkan pada tahun
PKP 10.000.000 s.d. 50.000.000 = 25%	PKP 25.000.000 s.d. 50.000.000 = 15%	PKP 50.000.000 s.d. 100.000.000 = 15%	2009) dan 25% (diefektifkan pada tahun 2010), bisa turun sebesar
PKP di atas 50.000.000 = 35%	PKP di atas 50.000.000 = 30%	PKP di atas 100.000.000 = 30%	5% untuk Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di BEI dan/atau lebih dari keseluruhan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.

Sumber : UU Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008
(www.pajak.go.id)

2.1.8 Insentif Pajak

Menurut T. Hani Handoko (2002) dalam Tierya (2012), insentif merupakan perangsang yang ditawarkan kepada karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Yang berarti, insentif pajak adalah suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak. Insentif pajak ada bermacam-macam, misalnya pemotongan pajak (*tax allowance*) dan pembebasan pajak (*tax holiday*).

Tetapi, penelitian yang dilakukan Yin dan Cheng (2004) memakai proksi perencanaan pajak untuk mengukur insentif pajaknya. Yin dan Cheng berpendapat bahwa upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dibatasi oleh perencanaan pajaknya (Subagyo dan Oktavia, 2010). Dan dalam penelitian Wijaya dan Martani (2011), digunakan proksi kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL) untuk mengukur manajemen laba dalam perusahaan, karena NDTL dianggap dapat mendeteksi manajemen laba.

2.1.9 Insentif Nonpajak

Selain dipengaruhi oleh insentif pajak, manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga dipengaruhi oleh insentif nonpajak. Insentif nonpajak merupakan insentif yang dilakukan perusahaan itu sendiri. Insentif nonpajak ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang berprestasi agar tetap bekerja dalam perusahaan. Dalam melakukan insentif nonpajak, setiap perusahaan memiliki caranya masing-masing. Menurut penelitian yang dilakukan Yin dan

Cheng (2004), insentif nonpajak dapat diukur dengan *earning pressure*, tingkat hutang, *earning bath*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial.

2.1.9.1 Earning Pressure

Earning pressure merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan guna menurunkan labanya. Jika laba pada tahun berjalan telah sama dengan tahun lalu, atau melebihi laba tahun lalu, maka perusahaan tertarik untuk melakukan *income smoothing*, karena para investor lebih menyukai laba yang relatif stabil (Wijaya dan Martani, 2011).

2.1.9.2 Tingkat Hutang Perusahaan

Tingkat hutang perusahaan merupakan besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar pada waktu yang akan datang. Tingkat hutang berbanding terbalik dengan laba. Jadi, apabila hutang perusahaan semakin besar, maka laba perusahaan akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya, jika hutang perusahaan semakin kecil, maka laba perusahaan semakin besar (Tierya, 2012).

Dan jika terkait dengan dunia perpajakan, semakin besar labanya, berarti perusahaan juga akan semakin besar membayar kewajiban pajaknya. Dengan meninjau hal tersebut, perusahaan sebisa mungkin memperkecil labanya atau memanipulasi laba agar pembayaran kewajiban pajaknya juga kecil. Manipulasi laba ini dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat hutang.

2.1.9.3 Ukuran Perusahaan

Richardson dan Lanis (2007), Guenther (1994), dan Watts dan Zimmerman (1978) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Ekspektasi bahwa perusahaan besar akan lebih mungkin untuk mengurangi laba laporan keuangan dan menunda laba kena pajak sebagai respon terhadap penurunan tarif pajak.

2.1.10 Tarif Pajak Penghasilan untuk Perusahaan *Go Public* dan Minimal 40% Saham Disetornya Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008, ada 5 (lima) hal yang diatur dalam penurunan tarif, yaitu :

1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tunggal tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.
2. Penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% dan/atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.

3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
5. Waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud di atas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

2.1.11 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 terhadap Manajemen Laba

Diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan, yaitu adanya perubahan tarif pajak, yang semula tarif progresif menjadi tarif tunggal, memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau sering disebut dengan manajemen laba.

Taxation motivation merupakan salah satu motivasi dalam manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2000). *Taxation motivation* berarti perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan laba yang akan dilaporkan menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan juga menjadi lebih rendah.

2.1.12 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Manajemen Laba

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) insentif pajak yang dilakukan perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan badan. Insentif pajak tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

2.1.12.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Yin dan Cheng (2004) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik, akan mendapatkan keuntungan dari *tax shields* dan akan dapat meminimalisir pembayaran pajaknya. Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik, akan berusaha mengurangi labanya agar kewajiban pajaknya menjadi lebih rendah.

2.1.12.2 Pengaruh Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih terhadap Manajemen Laba

Yulianti (2005) menyatakan bahwa kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dengan pola seperti ini, maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan, sehingga akan meningkatkan kewajiban pajak tangguhan bersih perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya.

2.1.13 Pengaruh *Earning Pressure* terhadap Manajemen Laba

Earning pressure merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan guna menurunkan labanya. Jika laba pada tahun berjalan telah sama dengan tahun lalu, atau melebihi laba tahun lalu, maka perusahaan tertarik untuk melakukan *income smoothing*, karena para investor lebih menyukai laba yang relatif stabil (Wijaya dan Martani, 2011).

2.1.14 Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Tingkat hutang merupakan besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar pada waktu yang akan datang. Tingkat hutang berbanding terbalik dengan laba. Jadi, apabila hutang perusahaan semakin besar, maka laba perusahaan akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya, jika hutang perusahaan semakin kecil, maka laba perusahaan semakin besar. Dan jika terkait dengan dunia perpajakan, semakin besar labanya, berarti perusahaan juga akan semakin besar membayar kewajiban pajaknya. Dengan meninjau hal tersebut, perusahaan sebisa mungkin memperkecil labanya atau memanipulasi laba agar pembayaran kewajiban pajaknya juga kecil. Manipulasi laba ini dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat hutang (Tiearya, 2012).

2.1.15 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Richardson dan Lanis (2007), Guenther (1994), dan Watts dan Zimmerman (1978) dalam Wijaya dan Martani (2012) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan

begitu akan lebih mungkin untuk menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Ekspektasi bahwa perusahaan besar akan lebih mungkin untuk mengurangi laba laporan keuangan dan menunda laba kena pajak sebagai respon terhadap penurunan tarif pajak.

2.1.16 Pengaruh Persentase Jumlah Saham Disetor Perusahaan di BEI terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat perbedaan tarif pajak penghasilan Badan, yaitu 28% (efektif pada tahun 2009) dan 25% (efektif pada 2010). Namun ada pengecualian bagi perusahaan *go public* yang saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan akan mendapat penurunan tarif sebesar 5% dari tarif sesungguhnya, apabila minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di BEI. Dengan demikian, perusahaan *go public* dengan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di BEI akan melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mendeteksi perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak, antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004) menguji pengaruh dari insentif pajak dan nonpajak terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi perubahan

tarif pajak di Amerika Serikat. Hasil penelitian Yin dan Cheng menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) lebih tertarik untuk mengurangi *discretionary accrual* untuk mendapatkan keuntungan perpajakan.

Yamashita dan Otogawa (2007) meneliti mengenai pengaruh dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan terhadap perusahaan di Jepang. Penelitian mereka membuktikan bahwa perusahaan menunda penghasilan mereka dalam menanggapi perubahan Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan laba kena pajaknya.

Setiawati (2001) menguji apakah ada perilaku manajemen laba dalam merespon perubahan Undang-Undang PPh tahun 1994 yang efektif per 1 Januari 1995 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Namun, hasil penelitian tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha untuk menurunkan laba tahun 1994 dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak pada tahun yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2004) membuktikan bahwa perusahaan masih melakukan praktek manajemen laba setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan 2000. Tingkat *discretionary accrual* setelah adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan 2000 lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan.

Penelitian yang dilakukan Subagyo dan Octavia (2010) menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) saja yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia. Perusahaan tersebut memanipulasi labanya untuk meminimalisir pembayaran pajaknya.

Peneliti juga menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) melakukan manajemen laba dengan dipengaruhi oleh insentif pajak dan insentif nonpajak, sedangkan perusahaan yang memperoleh kerugian (*loss firm*) melakukan manajemen laba dengan dipengaruhi oleh insentif nonpajak saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2011) merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Zulaikha (2004). Anggraeni tidak dapat menemukan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan laba kena pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Martani (2011) menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) dan perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak badan di Indonesia. Perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) melakukan praktek manajemen laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*). Peneliti juga membuktikan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) dipengaruhi oleh insentif pajak, yaitu perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih, serta insentif nonpajak, yaitu *earning pressure*. Sedangkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) dipengaruhi oleh faktor insentif pajak, yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih dan faktor insentif nonpajak, yaitu *earning pressure*.

Ringkasan hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yin dan Cheng (2004)	<i>Earning Management of Profit Firm and Loss Firm in Response to Tax Rate Reductions</i>	Menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (<i>profit firm</i>) lebih tertarik untuk mengurangi <i>discretionary accrual</i> untuk mendapatkan keuntungan perpajakan.
2	Yamashita dan Otagawa (2007)	<i>Do Japanese Firms Manage Earnings in Response to Tax Rate Reduction in The Late 1990s?</i>	Membuktikan bahwa perusahaan menunda penghasilan mereka dalam menanggapi perubahan Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan laba kena pajaknya.
3	Setiawati (2001)	Rekayasa Akrual untuk Meminimalkan Pajak	Hasil penelitian tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha untuk menurunkan laba tahun 1994 dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak pada tahun yang bersangkutan.
4	Wulandari, dkk (2004)	Indikasi Manajemen Laba Menjelang UU Perpajakan 2000 pada Perusahaan Manufaktur	Membuktikan bahwa perusahaan masih melakukan praktek manajemen laba setelah perubahan Undang-

		yang Terdaftar di BEJ	Undang Perpajakan 2000. Tingkat <i>discretionary accrual</i> setelah adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan 2000 lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan.
5	Subagyo dan Octavia (2010)	Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia	Menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (<i>profit firm</i>) saja yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia
6	Anggraeni (2011)	Analisis Tingkat <i>Discretionary Accrual</i> Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008	Tidak dapat menemukan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan laba kena pajaknya.
7	Wijaya dan Martani (2011)	Praktek Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008	Menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (<i>profit firm</i>) dan perusahaan yang mengalami kerugian (<i>loss firm</i>) melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak badan di Indonesia.

Sumber : diringkas dari berbagai jurnal

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang kaitannya mengenai manajemen laba yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang pajak, maka pembahasan mengenai alasan dan penyajian gambar sebagai berikut.

Manajemen laba dipengaruhi oleh penurunan tarif PPh badan tahun 2008, insentif pajak yang terdiri dari perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan, serta insentif nonpajak yang terdiri dari *earning pressure*, hutang perusahaan, ukuran perusahaan, dan presentase saham disetor.

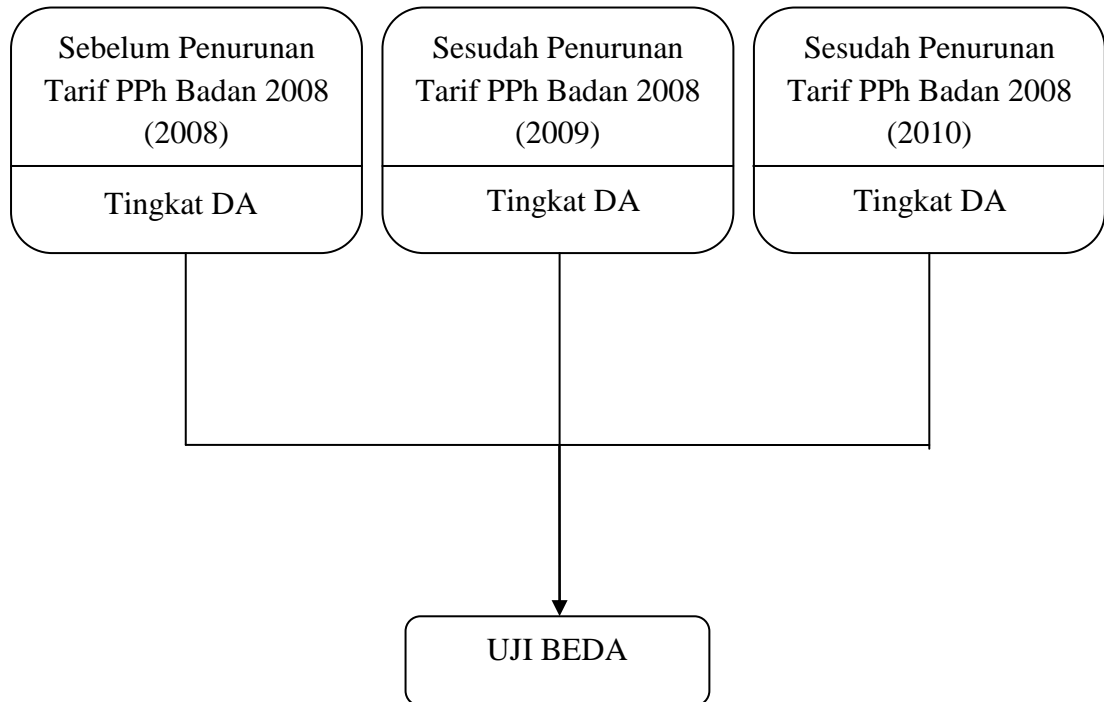
Penurunan tarif PPh badan tahun 2008 mempengaruhi manajemen laba dikarenakan adanya perubahan tarif pajak dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu dari 30% menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% pada 2010. Penurunan tarif tersebut membuat perusahaan menjadi memiliki motivasi untuk melakukan manajemen laba.

Selain penurunan tarif PPh badan, manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga dipengaruhi oleh insentif, yaitu insentif pajak dan insentif nonpajak. Insentif pajak terkait dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam dunia perpajakan yang seharusnya digunakan untuk memudahkan wajib pajaknya, namun seringkali wajib pajaknya memanfaatkan kebaikan dari pemerintah untuk kepentingannya sendiri, yaitu dengan melakukan manajemen laba, sehingga beban pajaknya menjadi lebih rendah dari yang semestinya.

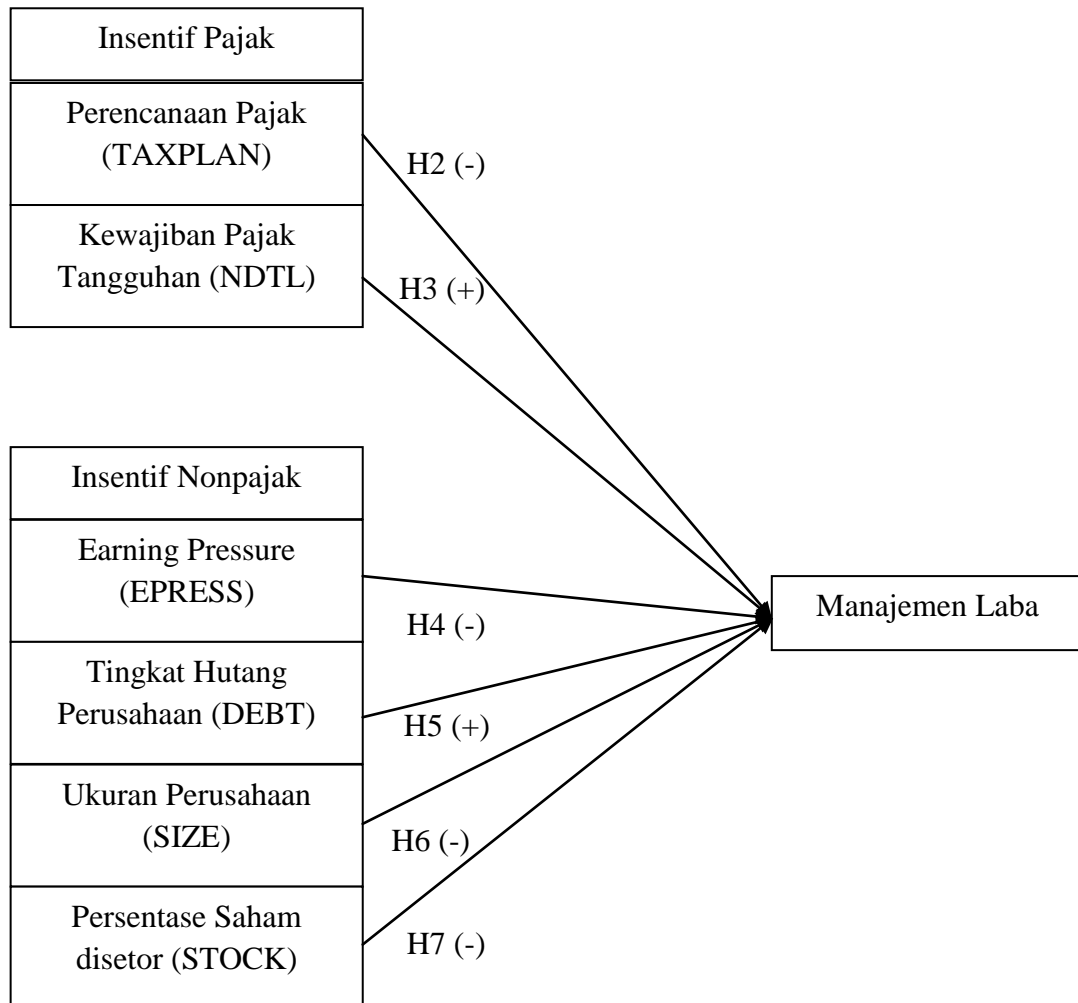
Sedangkan insentif nonpajak, yaitu *earning pressure*, terkadang dilakukan perusahaan untuk melakukan penurunan akrual yang bersifat menurunkan laba apabila perusahaan tersebut telah mencapai target labanya atau labanya melebihi

targetnya. Tingkat hutang perusahaan sangat berpengaruh dalam manajemen laba, karena perusahaan yang memiliki rasio *leverage* lebih tinggi dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Ukuran perusahaan (*size*) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Watts dan Zimmerman (1978) dalam Wijaya dan Martani (2012) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Dan yang terakhir, yaitu presentase jumlah saham disetor di BEI untuk perusahaan *go public* yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa, akan mendapatkan pengurangan pajak sebesar 5% dari tarif pajak yang seharusnya. Hal tersebut memungkinkan manajer untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan mengurangi beban pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.1 dan 2.2 berikut.

Gambar 2.1**Model Kerangka Teoritis – 1**

Gambar 2.2
Model Kerangka Teoritis – 2



2.4 Perumusan Hipotesis

Pada bagian ini dijelaskan berbagai rumusan hipotesis dengan argumentasinya. Masing-masing diuraikan sebagai berikut.

2.4.1 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 dengan Manajemen Laba

Political cost hypothesis merupakan salah satu hipotesis dalam teori akuntansi positif. *Political cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar cenderung untuk menurunkan labanya, dengan alasan masalah pelanggaran regulasi pemerintah (Watts dan Zimmerman, 1986). Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan dunia perpajakan. Perusahaan seringkali mencoba mengatur akuntansi perusahaannya guna mendapatkan keuntungan dengan adanya perubahan tarif pajak. Diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan, yaitu adanya perubahan tarif pajak, yang semula 30% menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010, memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau sering disebut dengan manajemen laba (Wijaya dan Martani, 2011).

Adanya perubahan tarif pajak yang cukup signifikan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, terutama perusahaan *go public*, karena adanya tambahan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal. Adanya perubahan tarif tersebut akan membuat manajemen melakukan insentif untuk meminimalisasi beban pajaknya, yaitu dengan cara menarik biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan atau sebaliknya, mengakui pendapatan periode

berjalan menjadi pendapatan periode yang akan datang. Diasumsikan bahwa biaya periode mendatang sama dengan periode tahun berjalan.

H1a : Tingkat *discretionary accrual* pada tahun 2009 setelah penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008 lebih tinggi daripada sebelum penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008.

H1b : Tingkat *discretionary accrual* pada tahun 2010 setelah penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008 lebih tinggi daripada sebelum penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008.

2.4.2 Perencanaan Pajak dengan Manajemen Laba

Perilaku manajemen tidak hanya dikaitkan dengan perubahan tarif pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur lain, yaitu insentif pajak dan nonpajak. Yin dan Cheng (2004) dalam Wijaya dan Martani (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik, akan mendapatkan keuntungan dari *tax shields* dan akan dapat meminimalisir pembayaran pajaknya.

Political cost hypothesis merupakan salah satu hipotesis dalam teori akuntansi positif. *Political cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar cenderung untuk menurunkan labanya, dengan alasan masalah pelanggaran regulasi pemerintah (Watts dan Zimmerman, 1986). Dalam hal ini, regulasi pemerintah berkaitan dengan hal perpajakan. Apabila perusahaan besar menurunkan labanya, maka pajak perusahaan tersebut juga menjadi turun (kecil).

H2 : Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.3 Kewajiban Pajak Tanggahan Bersih dengan Manajemen Laba

Yulianti (2005) dalam Martani dan Wijaya (2011) menyatakan bahwa kewajiban (aset) pajak tanggahan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dengan pola seperti ini, maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan, sehingga akan meningkatkan kewajiban pajak tanggahan bersih perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya (Wijaya dan Martani, 2011).

Pola perusahaan yang seperti itu sama dengan pola hipotesis dalam teori akuntansi positif, yaitu *bonus plan hypothesis*, yang menyebutkan bahwa manajer akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas mengenai bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer dan juga dapat meningkatkan kewajiban pajak tanggahan bersih perusahaan tersebut.

H3 : Kewajiban pajak tanggahan bersih berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.4.4 *Earning Pressure* dengan Manajemen Laba

Teori keagenan menggambarkan hubungan keagenan sebagai kontrak antara *agent* dan *principal*. *Agent* menutup kontrak untuk melakukan suatu hal tertentu bagi *principal*, begitu juga *principal* menutup kontrak untuk memberi imbalan kepada *agent*. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing

individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Hendriksen dan Brada, 1992).

Principal tidak memiliki informasi yang cukup terhadap kinerja *agent*, sehingga terjadi ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi.

Wijaya dan Martani (2011) menyatakan bahwa *earning pressure* merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan guna menurunkan labanya. Jika laba pada tahun berjalan telah sama dengan tahun lalu, atau melebihi laba tahun lalu, maka perusahaan tertarik untuk melakukan *income smoothing*, karena investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Jika laba perusahaan itu stabil, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

H4 : *Earning Pressure* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.5 Tingkat Hutang Perusahaan dengan Manajemen Laba

Tingkat hutang berbanding terbalik dengan laba. Apabila hutang perusahaan semakin besar, maka laba perusahaan akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya, jika hutang perusahaan semakin kecil, maka laba perusahaan semakin

besar. Jika dikaitkan dengan dunia perpajakan, maka semakin besar labanya perusahaan, berarti semakin besar pula pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan meninjau hal tersebut, perusahaan sebisa mungkin memperkecil labanya atau memanipulasi laba agar pembayaran kewajiban pajaknya juga kecil. Manipulasi laba ini dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat hutang (Tierya, 2012).

Eisenhardt (1989) dalam Haris (2004) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, salah satunya yaitu manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dalam hal ini, manajer sebagai manusia dapat dikatakan menghindari resiko perpajakan, yaitu dengan menaikkan tingkat hutang untuk memperkecil laba perusahaan.

H5 : Tingkat Hutang Perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.4.6 Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba

Richardson dan Lanis (2007), Guenther (1994), dan Watts dan Zimmerman (1978) dalam Wijaya dan Martani (2012) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Ekspektasi bahwa perusahaan besar akan lebih mungkin untuk mengurangi laba laporan keuangan dan menunda laba kena pajak sebagai respon terhadap penurunan tarif pajak.

Hipotesis ini sejalan dengan hipotesis yang ada dalam PAT, yaitu *political cost hypothesis*. *Political cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan dengan skala besar cenderung untuk menurunkan laba, dengan alasan masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan dunia perpajakan. UU mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan.

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.7 Persentase Jumlah Saham Disetor Perusahaan di BEI dengan Manajemen Laba

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat perbedaan tarif pajak penghasilan Badan, yaitu 28% (efektif pada tahun 2009) dan 25% (efektif pada 2010). Namun ada pengecualian bagi perusahaan *go public* yang saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan akan mendapat penurunan tarif sebesar 5% dari tarif sesungguhnya, apabila minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di BEI. Dengan demikian, perusahaan *go public* dengan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di BEI akan melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan (Wijaya dan Martani, 2011).

H7 : Persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi deskripsi mengenai variabel penelitian yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data.

3.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).

1. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel independen. Dalam hal ini, variabel dependennya adalah manajemen laba yang diukur menggunakan *discretionary accrual*.
2. Variabel independen merupakan variabel penjelas atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perubahan tarif pajak tahun 2008, insentif pajak yang berupa perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih, dan insentif nonpajak yang terdiri dari *earning pressure*, tingkat hutang, ukuran perusahaan, serta persentase jumlah saham disetor perusahaan di BEI.

3.2 Definisi Variabel

Definisi variabel berisi definisi dari variabel dependen dan variabel independen yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.2.1 Variabel Dependen

3.2.1.1 Manajemen Laba

Manajemen laba didefinisikan sebagai pilihan yang dilakukan manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Sedangkan Healy dan Wahlen (1999) mendefinisikan manajemen laba sebagai pelaporan keuangan yang tidak netral (memihak), dan manajer juga ikut campur tangan untuk menghasilkan keuangan pribadi.

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Perubahan Tarif Pajak Badan 2008

Perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2008 merupakan perubahan keempat sejak tahun 1983, 1994, 2000, dan yang terakhir tahun 2008 lalu. Dalam perubahan keempat ini, terdapat perubahan tarif pajak penghasilan badan, yaitu : (1) 28% diefektifkan tahun 2009 dan 25% diefektifkan tahun 2010, serta (2) penetapan tarif 5% lebih rendah dari tarif utama untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2.2.2 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak.

3.2.2.2.1 Perencanaan Pajak

Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan mendapatkan keuntungan dari *tax shields* dan dapat meminimalisir pembayaran pajaknya (Yin dan Cheng, 2004).

3.2.2.2.2 Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih

Kewajiban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Kiswara, 2011).

3.2.2.3 Insentif Nonpajak

3.2.2.3.1 *Earning Pressure*

Earning pressure merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan *income smoothing*. Hal tersebut dilakukan karena investor lebih menyukai laba perusahaan yang stabil (Wijaya dan Martani, 2011).

3.2.2.3.2 Tingkat Hutang Perusahaan

Tingkat hutang merupakan besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar pada waktu yang akan datang (Tearya, 2012).

3.2.2.3.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Richardson dan Lanis (2007), Guenther (1994), dan Watts dan Zimmerman (1978) dalam Wijaya dan Martani (2012) mengatakan bahwa perusahaan

yang lebih besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan.

3.2.2.3.4 Persentase Jumlah Saham Disetor Perusahaan di BEI

Persentase jumlah saham yang disetor di BEI merupakan persentase jumlah saham perusahaan yang disetor dan diperdagangkan di BEI, di mana saham perusahaan tersebut dapat dimiliki oleh publik.

3.3 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menunjukkan suatu cara bagaimana variabel diukur, sehingga mudah dalam melakukan pengolahan variabel dalam penelitian ini. Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.3.1 *Discretionary Accrual (DA)*

Discretionary Accrual (DA) merupakan alat yang paling sering digunakan untuk mengukur manajemen laba. *Discretionary accrual (DA)* adalah komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajer, artinya manajer memberi intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi.

Menurut Sanjaya (2008), hasil pengukuran *Discretionary Accrual* tinggi atau positif mengindikasikan manajer melakukan *income increasing*. Sebaliknya, jika hasil pengukuran *discretionary accrual* turun atau negatif mengindikasikan manajer melakukan *income decreasing*. Jika hasil pengukuran *discretionary accrual* bernilai nol, maka manajer tidak melakukan manajemen laba (Sanjaya, 2008).

Perhitungan *discretionary accrual* menggunakan model Jones (1991) modifikasian. Model Jones modifikasian digunakan karena memang telah banyak digunakan oleh peneliti dan memiliki hasil yang kuat. Berikut perhitungan *current accrual* :

$$CACC_{it} = (\Delta \text{Current Assets}_{it} - \Delta \text{Cash}_{it}) - (\Delta \text{Current Liabilities}_{it} - \Delta \text{Current Maturities Long-Term Debt}_{it} - \Delta \text{Income Tax Payable}_{it})$$

Model Guenther (1994) mengasumsikan bahwa pada saat tidak adanya manajemen laba, *nondiscretionary accrual* merupakan sebuah fungsi dari perubahan penjualan. Model estimasi untuk *nondiscretionary accrual* adalah sebagai berikut :

$$CACC_{it} / \text{Total Asset}_{it-1} = \beta (\Delta \text{Sales}_{it} / \text{Total Asset}_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

Kemudian, *discretionary accrual* diestimasi dengan mengurangi estimasi *nondiscretionary accrual* dari total aktual akrual seperti berikut :

$$U_{it} = CACC_{it} / \text{Total Asset}_{it-1} - \beta (\Delta \text{Sales}_{it} / \text{Total Asset}_{it-1})$$

3.3.2 Perencanaan Pajak (TAXPLAN)

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang. Agar pajak yang dibayarkan dapat ditekan seefektif mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan (Wijaya dan Martani, 2011).

Perencanaan pajak pada penelitian ini dihitung dengan rumus berikut :

a. Untuk tahun 2008

$$TAXPLAN = \frac{\sum 2008 (30\% \cdot PTI - CTE)}{TA2008}$$

b. Untuk tahun 2009

$$TAXPLAN = \frac{\sum 2009 (28\% \cdot PTI - CTE)}{TA2009}$$

c. Untuk tahun 2010

$$TAXPLAN = \frac{\sum 2010 (25\% \cdot PTI - CTE)}{TA2010}$$

$$\triangleright CTE = TI \times STR$$

Keterangan :

TAXPLAN = Perencanaan pajak

PTI = *Pre-tax income*

CTE = *Current portion of total tax expense* (beban pajak kini)

TA = *Total asset*

TI = *Taxable income*

STR = *Tax rate*

Perhitungan *taxplan* dalam penelitian ini berbeda dengan perhitungan yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menghitung perencanaan pajak setiap tahun, yaitu pada tahun 2008 saat UU PPh dikeluarkan,

tahun 2009 pada saat tarif efektif menjadi 28%, dan tahun 2010 pada saat tarif efektif menjadi 25%.

3.3.3 Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih (NDTL)

NDTL menggambarkan perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih tahunan. Variabel ini dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan praktek manajemen laba untuk menghindari kerugian.

Perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih dapat dihitung dengan menggunakan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disajikan dalam catatan pajak penghasilan perusahaan dibagi total aset di awal tahun (Wijaya dan Martani, 2011).

3.3.4 *Earning Pressure* (EPRESS)

Earning pressure dalam penelitian ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$EPRESS = \frac{\text{(Laba tahun berjalan - Laba tahun lalu)}}{\text{Total asset pada awal tahun}}$$

3.3.5 Tingkat Hutang Perusahaan (DEBT)

DEBT menggambarkan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan. Hutang berbanding terbalik dengan laba, sehingga jika hutang semakin besar, maka laba akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya. DEBT diukur menggunakan rasio kewajiban jangka panjang terhadap total aset di awal tahun.

3.3.6 Ukuran Perusahaan (SIZE)

SIZE diukur menggunakan logaritma total aset. Menurut Watts dan Zimmerman (2003), perusahaan yang lebih besar akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan.

3.3.7 Persentase Jumlah Saham Disetor Perusahaan yang Diperdagangkan di BEI (STOCK)

STOCK diukur menggunakan variabel dummy. Jika saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI kurang dari 40%, maka diberi angka 0, dan jika saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI lebih besar atau sama dengan 40%, maka diberi angka 1 (Wijaya dan Martani, 2012).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur yang telah *go public* dan sahamnya telah terdaftar di BEI dari tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2010. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling (judgement sampling)*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan bergerak di bidang manufaktur dan telah terdaftar di BEI pada tahun 2007-2010.
2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama kurun waktu 2007-2010.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan (audit) perusahaan manufaktur di Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

Periode penelitian meliputi periode tahun 2008 saat UU No. 36 tahun 2008 dikeluarkan, kemudian tahun 2009 saat tarif PPh badan berubah menjadi *single tax* dari 30% menjadi 28%, kemudian tahun 2010 dari 28% menjadi 25%.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mengadakan pencatatan dan penelaahan terhadap aspek atau dokumen yang berhubungan dengan objek dalam penelitian ini, yaitu laporan keuangan. Data laporan keuangan yang termasuk sampel diperoleh dari BEI. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan yang terpilih menjadi sampel.

3.7 Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji beda *t-test*, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtoses, dan kemencengan distribusi (*skewness*). Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai manajemen laba dengan menggunakan pendekatan *discretionary accrual* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kecuali sektor perbankan dan keuangan.

3.7.2 Uji Beda T-test

Uji beda T-test yang digunakan dalam penelitian ini adalah *paired sample t-test* yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Manajemen laba dapat dilihat dengan apakah ada perbedaan yang signifikan antara *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008 untuk tahun 2008, 2009, dan 2010. Pada penelitian ini, tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) (Ghozali, 2011).

Pengambilan keputusan dalam *paired sample t-test* adalah sebagai berikut:

1. Jika rata-rata *discretionary accrual* tahun 2008 > rata-rata *discretionary accrual* tahun 2009 dengan probabilitas > 0,05, maka H_a diterima, yang berarti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba tahun 2009 untuk menghemat pajak.

2. Jika rata-rata *discretionary accrual* tahun 2008 < rata-rata *discretionary accrual* tahun 2009 dengan probabilitas > 0,05, maka H_a ditolak, yang berarti bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba tahun 2009 untuk menghemat pajak.
3. Jika rata-rata *discretionary accrual* tahun 2009 > rata-rata *discretionary accrual* tahun 2010 dengan probabilitas > 0,05, maka H_a diterima, yang berarti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba tahun 2010 untuk menghemat pajak.
4. Jika rata-rata *discretionary accrual* tahun 2009 < rata-rata *discretionary accrual* tahun 2010 dengan probabilitas > 0,05, maka H_a ditolak, yang berarti bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba tahun 2010 untuk menghemat pajak.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka diadakan pengujian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data berdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat

distribusi yang normal atau tidak dalam model regresi, maka digunakanlah uji Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik.

Dalam analisis grafik, dasar pengambilan keputusan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal yang memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam uji Kolmogorov-Smirnov Z (1-sample K-S), dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai Asymp. Sig. (*2-tailed*) kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai Asymp. Sig. (*2-tailed*) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antarsesama variabel independen sama dengan nol. Menurut Ghazali (2011), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi biasanya dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
2. Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dan pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik *scatterplot*. Dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin Watson (DW Test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas (independen).

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan dengan analisis statistik regresi berganda. Pengujian regresi berganda di sini terdiri dari uji F, yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik t, yang digunakan untuk

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen, serta uji R^2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011).

Analisis regresi digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik-turunkan nilainya (Sugiyono, 2007 dalam Tierya, 2012).

Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Da_{it} = \alpha + \beta_1 TAXPLAN_{it} + \beta_2 NDTL_{it} + \beta_3 EPRESS_{it} + \beta_4 DEBT_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 STOCK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

DA_{it}	= <i>discretionary accrual</i> perusahaan i pada waktu pengamatan t
$TAXPLAN_{it}$	= perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan i pada periode pengamatan t
$NDTL_{it}$	= kewajiban pajak tangguhan bersih tahunan perusahaan i pada periode pengamatan t
$EPRESS_{it}$	= <i>earning pressure</i> perusahaan i pada periode pengamatan t
$DEBT_{it}$	= tingkat hutang perusahaan i pada periode pengamatan t
$SIZE_{it}$	= ukuran perusahaan i pada periode pengamatan t
$STOCK_{it}$	= persentase saham disetor perusahaan i yang diperdagangkan di BEI pada periode pengamatan t
α	= konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots \beta_7$	= koefisien variabel penjelas
ε_{it}	= variabel gangguan perusahaan i pada periode pengamatan t

3.7.4.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dasar analisis uji statistik F adalah sebagai berikut:

- a. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

3.7.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independen (Ghozali, 2011). Dasar analisis uji statistik t adalah sebagai berikut:

- a. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2011).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan adjusted R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1, maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.